

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, M. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.

Bambang, W. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Company, P. (2019). *Perumda Air Minum Kota Surakarta*. Surakarta.

Hartono, S. R. (2000). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: PT Mandar Maju.

Hartono, S. R. (2007). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Malang: Banyumedia.

Janus, S. (2012). *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Medan: Nuansa Aulia.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Dserah*. Jakarta: Penerbit Andi.

Natzir, M. S. (1985). *Perusahaan-perusahaan Pemerintah Daerah*. Bandung.

Pieris John, d. (2006). *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Cendekia.

Pipin, J. D. (2012). *Hukum Dagang di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.

Purwosutjipto, H. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Purwosutjipto, H. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Richard, S. B. (2007). *Aspek Hukum dalam Bisnis, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Indonesia Press.
- Soekardono, R. (1983). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Yani, G. W. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yudho, M. T. (2018). *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD*. Malang: Setara Press.

Jurnal

- Akbar, M. G. (2018). Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah ke Perseroan Daerah. *Perusahaan Daerah Air Minum Karawang*.
- Alhabsji, S. d. (2001). Kedudukan dan Peranan Perusahaan Daerah dalam Pelaksanaan yang Nyata dan Bertanggungjawab. *Universitas Brawijaya*.
- Cahyaningrum, D. (2018). Implikasi Bentuk Hukum Terhadap Pengelolaan BUMD. *Negara Hukum*.
- dkk, S. (2018). Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan : Studi Empirik pada PDAM Kota Surakarta. *Laporan Penelitian*.
- Harahap, R. D. (2011). BUMD di antara Ranah Hukum Publik dan Korporasi. *Asbanda*.
- Rustian, K. (2000). Makalah Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri Otda.

Narasumber

Istianto, E. (2020, Juli 15). Perumda Air Minum Kota Surakarta. *Personalia*. (I. A. Wicaksono, Interviewer)

Partaningrum, L. (2020, Juli dan Agustus 21 & 25). Perumda Air Minum Kota Surakarta. *Bagian Hukum*. (I. A. Wicaksono, Interviewer)

Peraturan Hukum

Inmendagri Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Perubahan Bentuk BUMD Kedalam dua Bentuk Perumda dan Perseroda. (n.d.).

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. (n.d.).

Permendagri Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Direksi dan Dewan Pengawas BPD. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. (n.d.).